



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7499-7509

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Pemberdayaan Masyarakat Penerima Manfaat (Studi Penelitian di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong)

Silfatul Marwah A. Antau, Rauf A. Hatu, Sainudin Latore
Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi
silfaantau23@gmail.com, raufhatu@ung.ac.id, Sainudin@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam pemberdayaan masyarakat penerima manfaat di Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa dan masyarakat penerima manfaat BSPS yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BSPS tidak hanya memberikan manfaat berupa perbaikan kualitas rumah, tetapi juga menghasilkan dampak pemberdayaan bagi masyarakat penerima manfaat. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan rumah, tumbuhnya rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan hunian, serta munculnya kemandirian dalam melakukan perbaikan rumah secara swadaya setelah program selesai. Selain itu, program juga memberikan dampak sosial berupa meningkatnya kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat hubungan sosial melalui praktik gotong royong selama proses pembangunan. Dari aspek ekonomi, bantuan yang diberikan mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam memperbaiki rumah. Meskipun demikian, tingkat pemberdayaan yang dihasilkan belum merata pada seluruh penerima manfaat karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi, tingkat partisipasi, dan kapasitas swadaya masyarakat. Dengan demikian, Program BSPS dapat dikatakan berkontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat, namun masih memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar dampak pemberdayaan dapat dirasakan secara lebih merata.

Kata kunci: BSPS, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Kemandirian, Masyarakat Penerima Manfaat.

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung, tempat tumbuh kembang keluarga, dan sarana pembentukan kehidupan sosial yang harmonis (Santosa, 2019).

Pasal 1 Undang-Undang Perumahan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan suatu bentuk konstruksi yang digunakan sebagai rumah atau utilitas penunjang kehidupan keluarga, representasi jati diri dan kehormatan penghuninya, juga merupakan item bangsa. Rumah memiliki banyak fungsi penting untuk seorang individu dan rumah tangga, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, sosial dan spiritual. Rumah harus memenuhi persyaratan fisik untuk berfungsi sebagai tempat tinggal yang menyenangkan, yaitu harus aman untuk ditinggali, memberikan rasa nyaman sosial dan mental, dan dapat menjaga rahasia keluarga. Dalam konteks Pembangunan perumahan nasional, pemerintah melalui No. 88/2014/ND-CP tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman menetapkan bahwa penyelenggaraan perumahan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Perumahan dan pemukiman memiliki fungsi strategis sebagai pusat Pendidikan keluarga, penguatan nilai budaya, serta sarana membangun generasi yang berkualitas (Rajun dkk, 2025).

Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Pemberdayaan Masyarakat Penerima Manfaat (Studi Penelitian di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong)

Dalam Kerangka kebijakan nasional, pemerintah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mengatasi masalah ini. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu upaya konkret untuk mengatasi masalah akses terhadap perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui BSPS, pemerintah bertujuan memberikan bantuan kepada MBR agar mereka dapat memiliki hunian yang memadai dan meningkatkan taraf hidup mereka. (Fernanda dkk, 2023).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni dengan memberikan bantuan stimulan berupa material, pendampingan, serta dukungan teknis agar masyarakat mampu membangun atau memperbaiki rumahnya secara mandiri. Melalui program ini, di harapkan tercipta lingkungan hunian yang sehat, aman, dan Sejahtera sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat (Kementerian PUPR, 2021).

Menurut Rajun dkk (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSPS di beberapa daerah di Indonesia mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah serta memperkuat nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan antarwarga. Program ini juga terbukti mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengambil keputusan terkait pembangunan rumah mereka sendiri. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada partisipasi masyarakat penerima manfaat serta dukungan dari pemerintah daerah dalam pengawasan dan pendampingan pelaksanaannya.

Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masalah yang tidak pernah tuntas terselesaikan, Masih banyak rumah yang belum layak huni. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti mahalnya harga lahan, tingginya harga material bangunan, serta upah tenaga kerja yang semakin meningkat. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar berupa rumah layak huni (Amini, 2019).

Menurut Korten dalam Rajun dkk (2025) pemberdayaan merupakan peningkatan kemandirian individu didasarkan pada kemampuan dan kekuasaan intrinsik yang dimilikinya terhadap sumber daya manusia (SDM) yang bersifat material dan non-material, menggunakan penyaluran kredit pengembalian. Pemberdayaan tidak hanya terjadi secara individu maupun kolektif, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan perubahan hubungan kekuasaan antara individu, kelompok, dan organisasi.

Desa Moutong Timur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini termasuk wilayah pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan buruh harian. Kondisi sosial ekonomi masyarakatnya tergolong menengah ke bawah, dengan tingkat pendapatan yang masih bergantung pada hasil alam dan sektor informal. Dari segi infrastruktur, sebagian rumah warga masih tergolong sederhana, bahkan ada pula yang belum memenuhi standar rumah layak huni. Hal inilah yang menjadikan Desa Moutong Timur sebagai salah satu sasaran pelaksanaan program pemerintah di bidang perumahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Program ini mulai direalisasikan pada tahun 2024 dengan total 30 unit bantuan rumah, yang terbagi dalam dua tahap, yaitu 10 unit pada bulan Agustus 2024 dan 20 unit pada bulan Oktober 2024. Setiap unit rumah dalam program ini di huni oleh satu kepala keluarga (KK), sehingga jumlah penerima bantuan berjumlah 30 KK dengan total 108 jiwa. Artinya, setiap rumah benar-benar menjadi tempat tinggal bagi satu keluarga yang memiliki hak penuh atas hunian tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam pemberdayaan masyarakat penerima manfaat.

2. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna yang terkandung di balik tindakan, pengalaman, serta cara individu atau kelompok menafsirkan realitas sosial mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022), esensi penelitian kualitatif terletak pada proses peneliti dalam menggali dan menafsirkan makna, bukan pada penyusunan generalisasi yang berlaku secara luas. Pada metode ini, peneliti

berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam seluruh proses penelitian, mulai dari melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan informasi, hingga menafsirkan temuan yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya menekankan pada hasil akhir penelitian, tetapi juga menaruh perhatian besar pada tahapan, dinamika, dan proses yang terjadi selama penelitian berlangsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi luas, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022) bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan realitas sosial secara rinci berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian ini dilakukan di desa moutong timur kecamatan moutong kabupaten Parigi Moutong provinsi Sulawesi Tengah.

3. Hasil dan Diskusi

A. Proses Pelaksanaan Program BSPS

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan berupa material bangunan atau dana stimulan, tetapi juga menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam proses pembangunan rumah mereka sendiri. Dengan demikian, program BSPS diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang, baik dari segi peningkatan kualitas tempat tinggal maupun peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan secara mandiri.

Proses pelaksanaan program BSPS di lapangan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup berbagai tahapan yang harus dilalui, setiap tahapan tersebut memiliki peran dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh kepala desa Bapak Ihwan yang mengatakan bahwa :

“Proses penetapan penerima BSPS di desa itu dilakukan lewat pendataan dan verifikasi langsung di lapangan. Untuk program ini, kami lakukan pendataan masyarakat, untuk mekanismenya itu dimulai dari kami usulkan nama-nama orang yang berhak dan layak dapat bantuan ini, terus mereka lengkapi dulu semua berkas yang diperlukan. Setelah itu, kami juga lakukan sosialisasi supaya masyarakat paham tentang program ini. Dan kami pemerintah desa juga ikut bantu fasilitasi jalannya program sampai selesai, termasuk juga terus lakukan pengawasan supaya semua berjalan baik, sesuai aturan, dan tepat sasaran”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa proses penetapan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Moutong Timur dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis. Tahapan awal dimulai dengan kegiatan pendataan masyarakat oleh pemerintah desa sebagai langkah untuk mengidentifikasi warga yang berpotensi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Pendataan ini menjadi dasar penting dalam menentukan calon penerima, sehingga data yang digunakan dalam proses penetapan benar-benar berasal dari kondisi real masyarakat di lapangan. Setelah proses pendataan dilakukan, pemerintah desa kemudian melanjutkan dengan tahap pengusulan nama-nama warga yang dianggap layak dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan BSPS sesuai dengan ketentuan program yang berlaku. Selanjutnya, dalam proses penetapan tersebut, calon penerima bantuan diwajibkan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari proses verifikasi. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang masuk telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait Program BSPS. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya di lapangan.

Selain berperan dalam proses pendataan, pengusulan, dan verifikasi, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi pelaksanaan Program BSPS hingga tahap akhir. Dalam proses ini, pemerintah desa turut melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut juga bertujuan agar pelaksanaan program tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima bantuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan penerima BSPS tidak hanya melibatkan aspek administrasi, tetapi juga koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah desa bersama pihak terkait.

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dalam perspektif fungsi adaptasi (A), kegiatan pendataan, pengusulan, dan verifikasi calon penerima bantuan mencerminkan upaya pemerintah desa dalam menyesuaikan kondisi sosial masyarakat dengan kriteria program. Pemerintah desa berperan sebagai pihak yang mengidentifikasi dan mengelola data masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan program BSPS, sehingga tujuan utama yaitu penyaluran bantuan yang tepat sasaran dapat tercapai. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai aktor utama dalam mengarahkan sumber daya administrasi agar selaras dengan tujuan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, fungsi integrasi (I) terlihat dari peran pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi, serta pengawasan selama pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan berfungsi untuk menyamakan pemahaman dalam sistem pelaksanaan program, sedangkan fasilitasi menunjukkan adanya koordinasi antar unsur pelaksana agar program berjalan lancar dan terarah. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan juga menunjukkan upaya menjaga keteraturan sistem agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BSPS di Desa Moutong Timur tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari sistem sosial yang terstruktur dan saling berkaitan. Setiap tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa, mulai dari pendataan hingga pengawasan, memiliki fungsi masing-masing yang saling mendukung dalam menjaga keteraturan pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan konsep Talcott Parsons Fungsionalisme Struktural yang menekankan bahwa setiap bagian dalam sistem sosial memiliki peran dan fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan BSPS sangat ditentukan oleh sinergi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari struktur sosial yang ada.

B. Pemahaman Masyarakat Tentang Program BSPS

Pemahaman masyarakat terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Pemahaman ini mencakup sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami tujuan program, sasaran penerima bantuan, serta mekanisme pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pembangunan rumah. Oleh karena itu, tingkat pemahaman masyarakat menjadi sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program, karena semakin baik pemahaman masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan keterlibatan mereka dalam setiap tahapan kegiatan BSPS. Selain itu, pemahaman masyarakat juga berkaitan dengan kemampuan mereka dalam menerima dan mengolah informasi yang diberikan oleh pemerintah desa maupun pendamping program. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Yuli yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, program ini bantuan rumah dari pemerintah untuk masyarakat yang kondisi rumahnya sudah tidak layak huni. Waktu sosialisasi dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan hanya sejumlah tertentu, jadi kalau nantinya ada kekurangan biaya atau bahan bangunan yang tidak mencukupi, itu sudah menjadi tanggung jawab penerima manfaat. Yang penting dari pihak pelaksana, rumah harus selesai dibangun dalam waktu tiga bulan. Saya pertama kali mengetahui kalau menerima bantuan ini dari Ibu Kesra”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki pemahaman dasar mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan kondisi rumah tidak layak huni. Informan memahami bahwa program ini bertujuan membantu masyarakat dalam memperbaiki kondisi rumah agar menjadi lebih layak untuk ditempati. Pemahaman tersebut diperoleh informan melalui sosialisasi yang dilakukan sebelum program dilaksanakan. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai jumlah bantuan yang diberikan, proses pelaksanaan pembangunan rumah, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penerima bantuan.

Informan juga menunjukkan pemahaman terhadap aturan dan tanggung jawab penerima bantuan dalam pelaksanaan Program BSPS. Informan menyadari bahwa bantuan yang diberikan memiliki batas tertentu sehingga apabila terdapat kekurangan biaya maupun bahan bangunan, maka penerima bantuan harus menanggung dan melengkapinya secara mandiri. Informan juga memahami adanya batas waktu pembangunan rumah yang telah ditentukan selama tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan pihak pendamping program cukup membantu masyarakat dalam memahami mekanisme serta kewajiban penerima manfaat dalam Program BSPS. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Maya dalam wawancara berikut:

“Bantuan ini dapat dikatakan hanya sebagai dorongan saja, sehingga tidak semua kebutuhan ditanggung sepenuhnya, awalnya saya juga sempat ragu untuk menerima bantuan ini karena saat itu suami saya belum bekerja, sehingga belum ada kelebihan biaya untuk menutupi kekurangan yang ada. tapi kami memang sudah memiliki tanah sendiri. Setelah saya pikir-pikir, kapan lagi bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Selain itu, ada juga aparat desa yang meyakinkan saya saat sosialisasi di kantor desa. Alhamdulillah, sekarang saya sudah memiliki rumah sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pada awalnya informan memandang Program BSPS sebagai bantuan yang bersifat stimulan atau dorongan saja, sehingga tidak semua kebutuhan pembangunan rumah ditanggung oleh pemerintah. Hal tersebut membuat informan sempat merasa ragu untuk menerima bantuan, terutama karena kondisi ekonomi keluarga saat itu masih terbatas, dimana suami informan belum bekerja sehingga belum memiliki kemampuan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah. Meskipun demikian, informan telah memiliki lahan sendiri sebagai syarat penerima bantuan. Namun setelah mempertimbangkan kembali peluang yang ada, informan merasa bahwa kesempatan tersebut sangat berharga dan tidak selalu datang dua kali. Keyakinan informan semakin kuat setelah adanya penjelasan serta penguatan dari aparat desa pada saat kegiatan sosialisasi di kantor desa, yang memberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program BSPS. Hal tersebut akhirnya mendorong informan untuk menerima bantuan tersebut hingga saat ini informan telah memiliki rumah sendiri yang layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan informan dalam menerima Program BSPS tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kebutuhan perumahan, tetapi juga oleh adanya pemahaman yang diperoleh melalui proses sosialisasi serta dukungan dari pihak pemerintah desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan mendorong keputusan masyarakat untuk menerima bantuan BSPS.

“waktu sosialisasi, ada dari pemerintah desa dengan fasilitator dari provinsi yang datang menjelaskan tentang program ini, mereka juga jelaskan juga apa-apa yang harus kami penuhi sebagai penerima, seperti misalnya kami harus ada tanah sendiri biar belum ada pondasi yang penting ada tanah dulu syarat utamanya dengan kondisi rumah yang memang sudah layak untuk mo dapat bantuan ini. Baru program ini ada aturan yang harus kami ikuti. Salah satunya kami harus siap menambah depe kekurangan denagn lanjut bangun rumah sampai selesai. Jadi waktu itu ba komitmen memang, bagi yang ragu itu dikase waktu disuruh pikir-pikir dulu atau mempertimbangkan, siap atau tidak dengan program ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Moutong Timur telah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama fasilitator dari provinsi menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi terkait ketentuan program, sehingga masyarakat memahami bahwa BSPS merupakan bantuan stimulan untuk membantu peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, bukan bantuan pembangunan rumah secara penuh.

Selain itu, masyarakat juga memahami adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi penerima bantuan, seperti kepemilikan tanah sebagai lokasi pembangunan serta kondisi rumah yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan. Masyarakat juga menyadari bahwa terdapat aturan dan tanggung jawab yang harus dipatuhi, termasuk kesiapan untuk menambah kekurangan biaya pembangunan serta melanjutkan proses pembangunan rumah hingga selesai. Hal ini menunjukkan bahwa melalui sosialisasi tersebut, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk memahami dan mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan kesediaan mereka mengikuti Program BSPS.

Jika dilihat dari hasil temuan di lapangan, pemahaman masyarakat terhadap Program BSPS tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sesuai dengan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, khususnya pada aspek integrasi (integrasi). Dalam teori Parsons, integrasi menjelaskan bahwa setiap unsur dalam masyarakat harus saling bekerja sama dan memiliki pemahaman yang sama agar sistem sosial dapat berjalan dengan baik. Pada pelaksanaan Program BSPS, pemerintah desa, fasilitator, dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan.

Hasil temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Sari Darmawati (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program BSPS sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pendamping program memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat, terutama dalam memahami bahwa BSPS merupakan bantuan stimulan yang tidak

sepenuhnya menanggung seluruh biaya pembangunan rumah. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian Fitri Sari Darmawati (2025), bahwa sosialisasi program tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menerima dan melaksanakan Program BSPS secara bertanggung jawab.

C. Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penerima Manfaat

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas rumah layak huni, tetapi juga diharapkan mampu memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap kondisi kehidupan penerima manfaat. Hal ini karena pelaksanaan program tidak semata-mata berfokus pada aspek fisik pembangunan rumah, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program BSPS dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

1. Dampak Sosial Program BSPS

Dampak sosial secara umum dalam kajian ilmu sosial dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada pola hubungan, interaksi, serta struktur kehidupan masyarakat sebagai akibat dari suatu program pembangunan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada tingkat individu maupun kelompok, yang kemudian memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dampak sosial sering dikaitkan dengan meningkatnya interaksi antar warga, penguatan hubungan sosial, serta tumbuhnya rasa kebersamaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa implementasi program BSPS berkontribusi terhadap peningkatan keterlibatan sosial masyarakat dan penguatan hubungan antar warga dalam kegiatan pembangunan di lingkungan penerima manfaat (Indrawati dkk, 2025).

Hal ini disampaikan oleh informan ibu Nini Samani dalam wawancara Sebagai Berikut :

“Waktu Pembangunan rumah ini ti tante (tetangga) pe anak sempat beberapa hari ada ikut membantu dengan ini tentara yang bekerja saya perumah karna waktu itu orang yang jaga ba bantu bekerja dengan ini tentara masih ada urusan lain jadi sy pe tetangga pe anak ini yang so ba bantu, hubungan dengan tetangga itu sebenarnya dari dulu memang sudah baik, jadi sampai sekarang juga masih tetap. Kami juga biasa saling membantu kalau ada acara”

Berdasarkan hasil wawancara, Informan mengatakan bahwa dalam proses pembangunan rumah BSPS, masyarakat sekitar juga ikut terlibat dalam membantu secara langsung. Informan menjelaskan bahwa pada saat pekerjaan pembangunan berlangsung, ada tetangga yang ikut membantu pekerjaan bersama pekerja yang sedang mengerjakan rumah. Hal ini terjadi karena pada saat itu pekerja lainnya sedang memiliki urusan lain, sehingga bantuan dari tetangga sangat membantu kelancaran pekerjaan di lapangan. Peneliti juga melihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut menunjukkan adanya rasa kebersamaan dan kepedulian antar warga. Bantuan yang diberikan bukan karena paksaan, tetapi muncul dari kesadaran dan hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki sikap gotong royong yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan pembangunan rumah BSPS.

Hubungan antar tetangga yang memang sudah terjalin baik sejak dulu dan tetap terjaga sampai sekarang menunjukkan adanya pemeliharaan pola (pattern maintenance) dalam sistem sosial masyarakat. Dalam perspektif Parsons, nilai-nilai kebersamaan yang sudah ada sebelumnya terus dipertahankan dan diwariskan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika program BSPS masuk, program tersebut tidak merusak struktur sosial yang ada, tetapi justru memperkuat fungsi sosial masyarakat yang sudah berjalan.

Kemudian Informan lain ibu Yanti Ladiku juga mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk kegiatan di masyarakat, saya biasa ikut kerja bakti setiap hari Jumat untuk membersihkan masjid. Selain itu, rumah saya sekarang ini sering digunakan sebagai tempat kegiatan posyandu remaja karena kebetulan saya juga kader. Sebelumnya kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor desa, tetapi karena kurang remaja yang datang, akhirnya kegiatan posyandu remaja sekarang dilaksanakan di rumah saya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa informan cukup aktif dalam kegiatan masyarakat, terutama dalam kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat untuk membersihkan masjid di lingkungan kampung. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan informan dalam kegiatan sosial yang rutin dilakukan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa setelah menempati rumah hasil program BSPS, dirinya ikut terlibat dalam kegiatan Posyandu Remaja yang dilaksanakan di rumahnya. Informan menjelaskan bahwa dirinya juga merupakan kader sehingga turut berperan dalam kegiatan tersebut. Informan menambahkan bahwa kegiatan Posyandu Remaja lebih efektif dilaksanakan di rumahnya karena jika diadakan di kantor desa, partisipasi

masyarakat khususnya remaja cenderung kurang. Dengan adanya pelaksanaan di rumah informan, kegiatan menjadi lebih ramai karena lokasi yang lebih dekat dengan lingkungan remaja, sehingga partisipasi masyarakat juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa rumah hasil program BSPS tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki peran sosial dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar.

Parsons menjelaskan bahwa integrasi terjadi ketika masyarakat mampu menjaga keteraturan melalui interaksi, kerja sama, dan solidaritas antar anggota sistem sosial. Keterlibatan informan dalam kerja bakti setiap Jumat serta kegiatan Posyandu Remaja menunjukkan adanya hubungan sosial yang semakin aktif dan terorganisir. Kegiatan ini tidak hanya menjadi aktivitas rutin, tetapi juga menjadi media yang memperkuat keterikatan sosial antar warga, sehingga sistem sosial di lingkungan tetap berjalan harmonis dan seimbang. Kemudian dalam hal ini Ibu Fitri juga mengatakan :

“Iya, hubungan kami menjadi lebih dekat setelah saya tinggal di rumah ini. Kalau sebelumnya kami hanya sekedar saling mengenal karena tempat tinggal saya dulu bukan berada di kompleks ini. Tapi setelah pindah ke sini, saya mulai lebih sering berinteraksi dengan tetangga, saling menyapa, dan ikut membantu apabila ada kegiatan atau acara di lingkungan sekitar. Karena itu, hubungan dengan tetangga sekarang menjadi lebih akrab dibandingkan sebelumnya”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, dapat diketahui bahwa hubungan informan dengan tetangga menjadi lebih dekat setelah informan menempati rumah hasil Program BSPS. Informan menyampaikan bahwa sebelumnya hubungan dengan tetangga hanya sebatas saling mengenal saja. Namun setelah tinggal di rumah yang sekarang, interaksi menjadi lebih sering dan hubungan sosial semakin akrab. Perubahan interaksi tersebut juga menunjukkan keterkaitan dengan fungsi Adaptation (adaptasi), di mana masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi baru setelah adanya pembangunan rumah BSPS. Perpindahan tempat tinggal informan yang lebih dekat dengan lingkungan sosial baru menyebabkan intensitas interaksi meningkat, sehingga tercipta pola hubungan sosial yang lebih aktif. Kemudian dari hasil wawancara Bersama ibu Yanti Ladiku peneliti melihat temuan ini sejalan dengan penelitian Fitri Sari Darmawati (2025) yang menjelaskan bahwa rumah hasil program sering kali memiliki fungsi tambahan sebagai ruang sosial yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, menunjukkan adanya bahwa Program BSPS tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas fisik rumah, tetapi juga memberikan dampak sosial berupa meningkatnya partisipasi masyarakat, serta intensitas interaksi sosial di lingkungan penerima manfaat.

2. Dampak Ekonomi Program BSPS

Dampak ekonomi secara umum dalam kajian ilmu sosial dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada kondisi pendapatan, pengeluaran, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari adanya suatu program pembangunan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada tingkat individu maupun rumah tangga yang kemudian memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam Penelitian Firdaus dkk (2025) yang menyatakan bahwa program pembangunan, termasuk program perumahan, memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berkurangnya beban pengeluaran dan meningkatnya kualitas hidup rumah tangga penerima manfaat. Dalam hal ini disampaikan oleh ibu Ami Napu dalam wawancara berikut :

“Kalau menurut saya, kondisi ekonomi sudah sedikit membaik karena uang yang sebelumnya digunakan untuk memperbaiki rumah sekarang bisa saya simpan untuk kebutuhan anak, seperti keperluan sekolah. Untuk penghasilan saya masih tetap dari hasil berjualan nasi kuning. Namun sekarang sudah berbeda karena saya berjualan di warung di depan rumah ini, jadi sudah tidak perlu lagi melakukan pengantaran (delivery)”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan mengatakan kondisi ekonomi keluarga setelah adanya Program BSPS mengalami sedikit peningkatan. Hal ini terlihat dari kemampuan keluarga dalam menyimpan sebagian pendapatan yang sebelumnya digunakan untuk perbaikan rumah, sehingga kini dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti biaya pendidikan anak. Selain itu, informan juga memiliki penghasilan tetap dari usaha jual nasi kuning yang dijalankan di rumah. Setelah rumah diperbaiki, usaha tersebut dipindahkan ke bagian depan rumah sehingga tidak lagi memerlukan sistem pengantaran (delivery). Kondisi ini membuat usaha menjadi lebih mudah dijangkau pembeli dan lebih efisien, sehingga memberikan dampak positif terhadap penghasilan keluarga. Kemudian informan lain ibu Jai Monoarfa mengatakan:

“Kalau menurut saya program ini sudah membantu, karena kalau seperti saya ini memang harus membangun ulang rumah, bukan hanya diperbaiki. Soalnya yang pertama itu karena pondasi sangat rendah bahkan tidak ada pondasi, jadi air laut bisa naik sedikit dan masuk ke dalam rumah. Kalau mau membangun rumah seperti ini pasti biayanya besar lagi. Alhamdulillah ada bantuan ini, tetap ada tambahan biaya juga, tetapi tidak sebanyak kalau harus membangun sendiri tanpa bantuan. Namun kalau kondisi ekonomi keluarga masih sama.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan menyatakan bahwa Program BSPS sangat membantu dalam mengurangi beban pembangunan rumah, terutama pada kondisi rumah yang sebelumnya. Bantuan tersebut meringankan kebutuhan biaya yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh keluarga apabila melakukan pembangunan rumah secara mandiri tanpa bantuan. Meskipun masih terdapat tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima manfaat, jumlahnya tidak sebesar jika tanpa bantuan program. Namun demikian, informan menilai bahwa secara umum kondisi ekonomi keluarga tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Program BSPS memberikan dampak ekonomi yang berbeda-beda pada setiap penerima manfaat. Pada sebagian masyarakat, program ini mampu membantu mengurangi pengeluaran keluarga yang sebelumnya digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah, sehingga pendapatan yang dimiliki dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih penting, seperti biaya pendidikan anak. Selain itu, kondisi rumah yang lebih layak juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti usaha kecil yang dijalankan di rumah. Perubahan pemanfaatan rumah sebagai tempat usaha menunjukkan bahwa program BSPS tidak hanya berdampak pada kondisi fisik hunian, tetapi juga memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan sumber penghasilan keluarga.

Namun, pada informan lain ditemukan bahwa dampak ekonomi yang dirasakan lebih berfokus pada berkurangnya beban biaya pembangunan rumah, bukan pada peningkatan kondisi ekonomi secara langsung. Bantuan BSPS dianggap mampu meringankan pengeluaran masyarakat karena biaya pembangunan tidak sepenuhnya ditanggung sendiri. Meskipun demikian, kondisi ekonomi keluarga secara umum belum mengalami perubahan yang signifikan karena masyarakat masih harus menambah biaya pembangunan dan tetap bergantung pada penghasilan utama yang dimiliki sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi Program BSPS tidak selalu berupa peningkatan pendapatan yang besar, tetapi lebih kepada kemampuan masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan teori struktural fungsional Talcott Parsons yang memandang masyarakat

sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, Program BSPS berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar berupa rumah layak huni sehingga dapat mendukung stabilitas kehidupan keluarga.

Melalui konsep fungsi dalam teori Talcott Parsons, rumah tidak hanya dipahami sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi keluarga. Ketika kondisi rumah menjadi lebih layak, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, termasuk aktivitas ekonomi seperti usaha kecil yang dilakukan di rumah. Program BSPS juga membantu masyarakat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya melalui pengurangan beban biaya pembangunan rumah. Dengan demikian, program ini berfungsi menjaga keberlangsungan dan keseimbangan kehidupan keluarga penerima manfaat agar dapat menjalankan perannya dalam masyarakat secara lebih baik.

3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi fisik rumah masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Melalui program ini, masyarakat penerima manfaat diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam pembangunan rumah, baik dalam bentuk tenaga, swadaya, kerja sama antarwarga, maupun pengelolaan bantuan yang diterima. Keterlibatan tersebut menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam memperbaiki kondisi kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat dalam Program BSPS dapat dilihat dari adanya perubahan pada kemampuan, partisipasi, kemandirian, serta rasa tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan program. Selain itu, program ini juga mendorong munculnya kerja sama dan gotong royong antarwarga dalam membantu proses pembangunan rumah penerima manfaat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat tersebut, Program BSPS diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini di sampaikan oleh ibu Citra Kambelu dalam wawancara berikut:

“Ya, setelah ada program ini saya rasa lebih mandiri karena pelan-pelan kami sudah bisa berpikir sendiri mana yang harus diperbaiki di rumah. Lalu cuman mo tunggu bantuan atau tunggu ada uang lebih baru mo ba perbaiki, tapi sekarang kalau ada yang rusak kecil-kecil kami usahakan sendiri. Suami juga jadi lebih yakin mo ba kerja sendiri karena waktu pembangunan rumah kemarin dorang sendiri yang ba bikin sama keluarga”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan menyatakan bahwa setelah adanya Program BSPS, masyarakat merasa lebih mandiri dalam mengelola dan memperbaiki kondisi rumahnya. Hal ini terlihat dari perubahan kebiasaan masyarakat yang sebelumnya cenderung menunggu bantuan atau menunggu adanya dana lebih untuk melakukan perbaikan rumah, namun setelah mengikuti program ini masyarakat mulai terbiasa untuk memikirkan dan menentukan sendiri bagian rumah yang perlu diperbaiki secara bertahap sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemudian Informan lain juga mengatakan ibu yuli dalam wawancara berikut:

“Sekarang kalau ada kebutuhan lain di rumah, misalnya mau tambah dapur atau buat WC, kami tidak lagi tunggu bantuan lagi, kami sudah mulai berusaha sendiri sedikit-sedikit karena dengan adanya bantuan BSPS ini kami jadi lebih semangat untuk lanjutkan pembangunan rumah sesuai kemampuan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa setelah adanya Program BSPS, informan tidak lagi menunggu bantuan tambahan atau dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah seperti penambahan dapur dan WC. Masyarakat mulai berinisiatif untuk melanjutkan pembangunan secara bertahap dengan usaha sendiri sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan semangat dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kondisi rumah secara berkelanjutan.

Temuan ini didukung oleh penelitian Putri Rajun dkk, (2025) yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan perumahan mampu meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan rumah. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan,

tetapi juga terlibat aktif dalam proses pelaksanaan program melalui swadaya, kerja sama, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya peningkatan kemandirian, partisipasi, serta kesadaran masyarakat dalam memperbaiki rumah secara bertahap, sehingga memperkuat konsep pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan dari Program BSPS.

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Program BSPS memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam aspek kemandirian, partisipasi, dan perubahan pola pikir dalam mengelola kebutuhan rumah tangga. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga turut terlibat secara aktif dalam proses pembangunan rumah melalui swadaya, kerja sama, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Selain itu, adanya perubahan sikap masyarakat yang lebih responsif terhadap perbaikan rumah menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi kebutuhan hidup secara mandiri.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penerima Manfaat (*Studi Penelitian di Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong*) maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Moutong Timur dilakukan secara terstruktur mulai dari pendataan, pengusulan, verifikasi, sosialisasi, hingga pengawasan oleh pemerintah desa. Setiap tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Dengan demikian, pelaksanaan Program BSPS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan adanya koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program di lapangan. 2). Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Moutong Timur telah memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat terkait ketentuan, mekanisme, serta tanggung jawab sebagai penerima bantuan. Masyarakat memahami bahwa BSPS merupakan bantuan stimulan yang tidak menanggung seluruh biaya pembangunan sehingga terdapat kewajiban untuk menambah kekurangan biaya serta menyelesaikan pembangunan rumah secara mandiri. Sosialisasi juga menjadi dasar pertimbangan bagi masyarakat dalam menerima bantuan sehingga pelaksanaan program dapat diterima dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. 3). Program BSPS memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat. Pada aspek sosial, program ini memperkuat interaksi dan solidaritas antarwarga melalui kegiatan gotong royong, meskipun pada sebagian masyarakat hanya mempertahankan hubungan yang sudah ada. Pada aspek ekonomi, dampak utama yang dirasakan adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga, sementara perubahan pendapatan tidak terlalu signifikan. Pada aspek pemberdayaan, program ini meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memperbaiki dan mengelola rumah. Dengan demikian, dampak BSPS lebih dominan pada pengurangan beban ekonomi dan peningkatan kemandirian masyarakat.

Referensi

1. Amini, R. (2019). *Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. UIN Suska Riau Repository. Retrieved from <https://repository.uin-suska.ac.id/21630/2/GABUNG.pdf>
2. Andika Maiqirlana, Syamsul Huda & Anisa Fitria Utami. (2023). Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bantuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 71–83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8399103>
3. Darmawati, F. S. (2025). *Peran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat kurang mampu di Desa Koto Damai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru]. <https://share.google/emvt4RPzGDv0SPTu5>
4. Eliza, F., Nurmasari, N., & Zulkifli, Z. (2020). Evaluasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Karya Tunas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir. *Rapik: Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.47134/rapik.v1i2.13>
5. Fernanda, F. F., Marseto, M., & Nisa, F. L. (2023). Peran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Tempuran Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 240–249. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5224>
6. Firdaus, E. A., Huda, S., & Utami, A. F. (2023). Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Pule. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 245–255. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5347>
7. Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
8. Indrawati, M., Hendrian, H., & Lubis, R. Y. (2025). *Pengaruh Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Kesejahteraan Penerima*. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v5i1.1635>
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Laporan akhir Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)*. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR.
10. Maiqirlana, A., Huda, S., & Utami, A. F. (2024). Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap kondisi sosial ekonomi penerima bantuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8399103>
11. Malahati, F., Ultavia, B. A., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
12. Moleong, L. J. (2022). *A. Jenis dan Pendekatan Penelitian*. Salema Empat. Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
13. Pablo, E., & Andriyus. (2024). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(1), 183–195. <https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17315>
14. Pratiwi, A., & Setyowati, R. R. N. (2021). Peran Organisasi Lingkungan Tunas Hijau Dalam Upaya Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 535–549. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p535-549>
15. Puasanty, T. A., Primandhana, W. P., & Sishadiyati. (2023). Pemanfaatan swadaya yang dimiliki penerima bantuan dalam mendukung pembangunan rumah layak huni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 790–798. <https://share.google/8VqZSgCBwuUc8njK>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9714>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

16. Indrawati, M., Hendrian, H., & Lubis, R. Y. (2025). *Pengaruh Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Kesejahteraan Penerima*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v5i1.1635>
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Laporan akhir Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)*. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR.
18. Maiqirlana, A., Huda, S., & Utami, A. F. (2024). Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap kondisi sosial ekonomi penerima bantuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8399103>
19. Malahati, F., Ultavia, B. A., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
20. Moleong, L. J. (2022). *A. Jenis dan Pendekatan Penelitian*. Salema Empat. Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
21. Pablo, E., & Andriyus. (2024). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(1), 183–195. <https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17315>
22. Pratiwi, A., & Setyowati, R. R. N. (2021). Peran Organisasi Lingkungan Tunas Hijau Dalam Upaya Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 535–549. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p535-549>
23. Puasanty, T. A., Primandhana, W. P., & Sishadiyati. (2023). Pemanfaatan swadaya yang dimiliki penerima bantuan dalam mendukung pembangunan rumah layak huni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 790–798. <https://share.google/8VqZSgCBwuLUc8njK>
24. Putri, A., & Wijayanti, R. (2022). Penelitian deskriptif kualitatif dalam studi pendidikan. *Jurnal Citra Pendidikan*, 9(1). <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jcp/article/view/5162>
25. Rajun, P. S., Amir, M., & Makmur, M. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui program Bantuan Stimulasi Perumahan Mandiri dalam menciptakan rumah layak huni. *Trajectories of Public Administration*, 2(2), 187–200. <https://trajectories.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/75>
26. Ratnasari, R., & Jatmiko, J. (2020). Peran program BSPS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Perumahan dan Pembangunan*, 12(2), 45–56.
27. Rismanita, I., Rusli, Z., & Harapan Tua, R. F. S. (2020). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 18(1), 589–598. <https://doi.org/10.46730/jiana.v18i1.7923>
28. Rivani, E., & Anggraini, N. (2025). Partisipasi penerima bantuan dalam implementasi program rumah swadaya di Kelurahan Gates Nan XX. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(1), 77–86. https://ejournal.stisipimambonjol.ac.id/index.php/SIMBOL/article/view/18_2
29. Rizal, R., & Pratama, P. (2020). Efektivitas program BSPS dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin. *Jurnal Perumahan*, 15(1), 33–44.
30. Rofiqoh, S. (2021). *Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sebrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tahun 2017* [Skripsi, STIA Pembangunan Jember]. <https://share.google/1NAPW7HGZVo0F9HCu>
31. Santosa, D. (2019). Pentingnya rumah layak huni dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 15–26
32. Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
33. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta
34. Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). Upaya penanaman pendidikan karakter di sekolah dasar: Telaah pendekatan struktural fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda*, 4(1), 24–33. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v4i1.1839>
35. Yulasteriyani, Y. (2020). Pembangunan Masyarakat Miskin Di Pedesaan Perspektif Fungsionalisme Struktural. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 3(02), 213–225. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.158>
36. Zahira, S. N., & Rohaeti, A. (2024). Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Penurunan Angka Kemiskinan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrieb.v4i1.3695>